

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negeri tropis yang memiliki dua musim yaitu musim panas dan musim hujan dengan penyinaran serta curah hujan yang menyeluruh di setiap penjuru Indonesia. Pada masa hujan, intensitas curah hujan di Indonesia amat besar membuat sebagian wilayah khususnya pada dataran rendah rentan terjalin bencana banjir. Bencana banjir ini harus segera ditanggulangi dengan strategi yang baik dan optimal. Ulum, M. C (2013:69) menyatakan bahwa Banjir bisa menyebabkan akibat buruk apabila tidak lekas ditanggulangi dapat berakibat pada ekonomi serta lingkungan yang mengusik kehidupan Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam upaya untuk meminimalisir dampak dari bencana yang terjadi, dalam hal ini peneliti fokus pada penanggulangan pada tahap pasca bencana banjir yaitu penanggulangan setelah terjadinya bencana banjir.

Bencana banjir disebagian wilayah Indonesia, hingga saat ini masih menjadi isu penting yang harus ditanggulangi. Menurut Sutupo Purwo Nugroho (2015) keadaan bencana banjir dengan tingkat kerawanan sedang hingga tinggi terbanyak yaitu di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kabupaten Pati merupakan daerah di Indonesia yang memiliki daerah rawan banjir yang cukup banyak.

Menyadari kerentanannya terhadap bencana, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berfungsi sebagai lembaga pemerintah pelengkap pada saat terjadi bencana. Landasan pembentukan BNPB ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 milik Badan Penanggulangan Bencana. Pemenuhan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana oleh Pemerintah terlihat melalui pembentukan BNPB. Penanggulangan bencana banjir di daerah yang berperan dan memiliki tanggung jawab terbesar ialah Berpedoman pada

arahan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah berfungsi sebagai organisasi pemerintah yang independen terhadap departemen tertentu, yang mengawasi penanggulangan bencana di berbagai wilayah yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota. Sesuai ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 yang mengatur tentang struktur dan protokol operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati, BPBD Kabupaten Pati berfungsi sebagai badan yang bertugas melakukan mitigasi bencana alam, dengan fokus khusus. Tentang penanggulangan banjir di wilayah hukum Kabupaten Pati. BPBD Kabupaten Pati berperan penting dalam mendukung Bupati dengan ikut aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah terkait penanggulangan bencana, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut, BPBD melaksanakan berbagai tanggung jawab, yang dituangkan dalam (BPBD Kab. Pati, 2019) :

- 1) Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang penanggulangan bencana.
- 2) Memberikan bantuan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah dalam rangka bencana.
- 3) Memberikan bimbingan untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan peralatan regional, logistik, rehabilitasi, rekonstruksi, serta kesiapsiagaan dan pencegahan keadaan darurat.
- 4) Melaksanakan kegiatan pelaporan, pengkajian, dan pemantauan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
- 5) Mengawasi administrasi, keuangan, personel, peralatan, dan fasilitas di lingkungan BPBD; dan
- 6) Memenuhi tugas tambahan yang diberikan jika diperlukan.

“Kabupaten Pati memiliki peringkat 95 dari 394 kota atau kabupaten untuk bencana banjir.” (BNPB, 2020). Hal itu tergolong tinggi dibanding Bencana yang lain yaitu gempa, tanah longsor dan kekeringan. Hal ini membuktikan bahwa ancaman bencana alam tertinggi sekaligus yang paling rawan di Kabupaten Pati adalah bencana alam banjir yang kerap terjadi di

musim hujan tiap tahunnya. Kabupaten Pati diapit pegunungan Muria serta pegunungan Sukolilo yang membuat aliran air dari dua pegunungan mengalir ke Kabupaten Pati dan menjadi salah satu penyebab bencana banjir. Penyebab lainnya adalah beberapa daerah adalah dataran rendah yang mendapatkan aliran air dari sungai dan saluran irigasi yang tidak dapat menahan volume air hujan yang cukup deras selama musim hujan.

BPBD Kabupaten Pati dalam hal penanggulangan bencana banjir memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah yang terdampak bencana banjir, agar penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik BPBD haruslah memiliki strategi yang tepat. Mengenai hal tersebut diatur juga dalam peraturan bupati pati nomor 118 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan bupati pati nomor 27 tahun 2018 tentang rencana strategis badan penanggulangan bencana daerah kabupaten pati tahun 2017-2022.

Tabel 1.1

Daftar Kecamatan Di Kabupaten Pati Terkena Bencana Banjir

Nama Kecamatan	Tahun
Kecamatan Pati	2020
Kecamatan Tambakromo	2021
Kecamatan Winong	
Kecamatan Pucakwangi	
Kecamatan Gabus	
Kecamatan Tambakromo	2022
Kecamatan Winong	
Kecamatan Gabus	
Kecamatan Juwana	
Kecamatan Jakenan	
Kecamatan Sukolilo	

Sumber : Diolah Peneliti Dari Berbagai Sumber, 2023.

Kabupaten Pati terdapat 21 Kecamatan, 5 Kelurahan, dan 401 Desa (patikab.go.id). Pada tahun 2020 terjadi bencana banjir yang melanda 1 daerah yaitu Kecamatan Pati Kabupaten Pati pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 16.00 WIB hal tersebut diakibatkan hujan dengan intensitas tinggi (pusatkrisis.kemkes.go.id). Sedangkan, pada tahun 2021 bencana banjir terjadi di 4 kecamatan, yaitu Tambakromo, Winong, Pucakwangi, Gabus pada tanggal 25-11-2021 (pusatkrisis.kemkes.go.id). Bencana Banjir yang melanda wilayah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, masih bisa dibilang cukup tinggi. Bahkan banjir di beberapa titik Kota Pati mencapai 130 sentimeter pada tahun 2022 (mediaindonesia.com). Ada enam kecamatan di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang kerap dilanda banjir dikala masa hujan yaitu Kecamatan Winong, Tambakromo, Gabus, Juwana, Jakenan, dan Sukolilo.

Berdasarkan laporan data per tanggal 2 Desember 2022, pukul 10.00, pengungsian terdapat di Desa Sinomwidodo berjumlah 200 jiwa. Korban jiwa tercatat dua orang atas nama Sumirah (65) dan Su Ami (61) warga Desa Sinomwidodo, Kecamatan Tambakromo. Sedangkan luka ringan ada tujuh orang berasal dari Sinomwidodo. Data rumah rusak sementara, di Desa Sinomwidodo ada tiga unit rumah roboh, 212 unit rusak sedang dan 417 unit rusak ringan. Adapun, di Desa Godo ada dua rumah terdampak banjir. Sementara itu, ada beberapa infrastruktur yang terhempas banjir. Tercatat ada 2 jembatan penghubung antar dukuh yang ambrol di Desa Kropak, Kecamatan Winong sebuah jalan penghubung tergerus aliran sungai dan satu desa di Desa Gunungpanti Kecamatan Winong ambrol. Selain itu, 21 ternak tercatat terdampak. Rinciannya 12 ekor kambing hanyut, tiga ekor sapi hanyut, dan enam ekor sapi mati di kandang. Hal tersebut menjadikan banjir yang terjadi di Kabupaten Pati mendapatkan atensi penuh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah. Selain pemenuhan kebutuhan penyintas, BPBD Jateng juga mengimbau warga di dekat sungai waspada jika hujan deras terjadi dalam jangka lebih dari satu jam (jatengprov.go.id).

Gambar 1.
Kondisi Lokasi Terdampak Banjir



(Sumber : jatengprov.go.id)

Gambar 2.
Hewan Ternak Terdampak Banjir



(Sumber : <https://www.tvonenews.com/>)

Meski dua bulan berselang, sejumlah desa di Pati masih juga kebanjiran. Bahkan ketinggian banjir dilaporkan kembali meninggi. Setidaknya ada lima desa yang kini tergenang banjir. Kondisi itu seperti yang terjadi di Desa Kasiyan, Kecamatan Sukolilo. Banjir masih menggenangi sejumlah rumah warga hingga jalan raya penghubung Kayen – Kudus. Kondisi banjir justru semakin meninggi (suaramerdeka-muria.com).

"Jadi intinya apa yang kita lakukan ini semua sepakat bahwa kita dalam waktu per 4 Maret mulai situasi gawat darurat bencana dan saat ini terjadi Kabupaten Pati" kata Pj Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro kepada wartawan ditemui di Pendapa Kabupaten Pati, Rabu (8/3/2023).

Pada saat terjadi bencana banjir lokasi daerah yang terkena dampak banjir mengalami kerugian dari segi material dan non material seperti kerusakan bangunan-bangunan, kesulitan air bersih, kehilangan harta benda, timbulnya penyakit, melumpuhkan aktivitas masyarakat, dll. BPBD Kabupaten Pati akan melakukan rehabilitasi dan rekontruksi dalam rangka untuk memulihkan kondisi daerah terdampak banjir agar kembali seperti semula. Di dalam pemulihan kondisi terdampak banjir banyak kendala yang ada seperti terlalu luasnya daerah terdampak banjir, kurangnya sarana prasarana yang dibutuhkan, juga terbatasnya dana yang ada. Di dalam mengatasi hal tersebut dibutuhkanlah strategi dari BPBD untuk menanggulangi pasca bencana banjir agar dapat terlaksana rehabilitasi dan rekontruksi dengan baik.

Adanya masalah pada saat terjadi bencana banjir lokasi daerah yang terkena dampak banjir mengalami kerugian dari segi material dan non material seperti kerusakan bangunan-bangunan, kesulitan air bersih, kehilangan harta benda, timbulnya penyakit, melumpuhkan aktifitas masyarakat. BPBD Kabupaten Pati akan melakukan rehabilitasi dan rekontruksi dalam rangka untuk memulihkan kondisi daerah terdampak banjir agar kembali seperti semula dan mencegah terjadinya bencana. Di dalam pemulihan kondisi terdampak banjir banyak kendala yang ada seperti terlalu luasnya daerah terdampak banjir, kurangnya sarana prasarana yang dibutuhkan, juga terbatasnya dana yang ada, dan kurangnya sumber daya, serta kurangnya partisipasi masyarakat terdampak banjir. Di dalam mengatasi hal tersebut dibutuhkanlah strategi dari BPBD untuk menanggulangi pasca bencana banjir agar dapat terlaksana rehabilitasi dan rekontruksi dengan baik. Islam et.al (2016) menyatakan strategi merupakan kunci untuk menghadapi

skenario pasca bencana yaitu untuk memiliki kerangka kerja atau program yang komprehensif yang terdiri dari perencanaan bencana, manajemen sumber daya dan hasil (rekonstruksi dan rehabilitasi).

Pada tahun-tahun sebelumnya Pemerintah Kabupaten Pati sudah mengupayakan untuk mengatasi masalah bencana banjir yang ada di Kabupaten Pati. Patikab.go.id, (2014) ada upaya-diterapkan oleh pemerintah pati mengatasi banjir seperti.

1. Sistem Saluran Air yang Baik

Seiring dengan itu, butuh diadakan sistem irigasi sampai pembuangan akhir yang jelas. Jangan sampai akhir saluran air yang ada berujung pada sebuah sungai mati atau tidak mengalir, sehingga airnya akan meluber. Luberan inilah yang membahayakan.

2. Disiplin Membuang Sampah

Dibutuhkan kedisiplinan warga untuk membuang sampah di tempat sampah dan berakhir di tempat pembuangan akhir sampah. Pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir sampah ini akan sangat diperlukan. Pengolahan sampah yang tepat bisa membantu pencegahan banjir.

3. Pembersihan Saluran Air

Perbaikan-perbaikan dan pembersihan saluran air tentu harus ada. Diwilayah tertentu bisa diadakan secara gotong-royong. Penjagaan ini harus dilakukan secara terus-menerus dengan waktu berkala. Bukan hanya sampah yang terbuang di saluran air, namun ada juga sampah dari saluran air. Tumbuhan-tumbuhan air yang telah mati jika berkumpul juga akan menghambat saluran air. Tanggul-tanggul sebagai penahan membutuhkan perawatan.

4. Kerja Sama yang Baik dari Seluruh Pihak

Bila kerja sama warga di suatu wilayah dapat terjalin dengan baik, pencegahan banjir ini bisa dilakukan dengan mudah. Tentu saja jalinan warga dan pemerintah tetap harus dilakukan.

Berdasarkan apa yang pernah dilakukan tersebut pada kenyataannya semakin ke sini bencana banjir di Kabupaten Pati semakin parah. Oleh karena

itu, dalam rangka mencegah bencana banjir Pemerintah Kabupaten Pati melakukan reboisasi 5000 tanaman buah (Mitrast.com, 2022). Kegiatan tersebut memang difokuskan untuk melakukan penanaman jenis tanaman keras. Jenis tanaman buah yang ditanam pada kegiatan tersebut, diantaranya yakni tanaman kelengkeng, buah sawo, alpukat, dan lain sebagainya. Dengan adanya hal tersebut Pemkab Pati berharap bencana banjir di Kabupaten Pati bisa diminimalisir bahkan bisa teratasi.

Gambar 3.
Reboisasi 5000 Tanaman Buah



(Sumber : Mitrast.com)

Jika langkah-langkah yang ditempuh masih belum bisa mencegah banjir karena banjir yang datang merupakan banjir kiriman atau murni sebuah bencana karena hujan yang deras tak henti-henti, hendaknya kita tak perlu melempar kesalahan. Kesadaran yang tinggi yang diperlukan untuk suatu pencegahan dan penanggulangan bencana banjir. Bukan malah menyalahkan pihak tertentu karena sebuah bencana itu untuk ditangani dan ditanggulangi bukan malah mencari kambing hitam dari bencana tersebut.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun dari Pemerintah Kabupaten Pati belum banyak membuahkan hasil. Masih ada beberapa wilayah yang masih terkena bencana banjir disertai lamanya surutnya air setiap tahunnya. Ada beberapa permasalahan dalam penanganan bencana banjir ini seperti luasnya cakupan wilayah, kurangnya partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana yang

dibutuhkan, serta terbatasnya sumber dana yang ada. Mengapa penanganan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati tidak bisa menyelesaikan masalah lamanya surutnya air banjir dengan cepat?. Berdasarkan keadaan tersebut, perlunya dilakukan manajemen penanggulangan yang nantinya mencakup rencana, pelaksanaan, dan evaluasi sejauh mana upaya yang telah dilakukan dalam menangani bencana banjir dengan maksud adanya sistem manajemen upaya yang dilakukan dapat memberikan arah yang jelas dalam penanggulangan bencana banjir, meninjau kekuatan BPBD yang akan digunakan agar dapat membuat langkah-langkah yang efektif serta efisien, serta mengetahui faktor-faktor penghambat yang dapat timbul dalam penanggulangan bencana banjir supaya dapat mengurangi resiko kegagalan dalam proses yang ada. Permasalahan tersebutlah yang melatarbelakangi peneliti untuk membuat kajian tentang manajemen penanggulangan bencana banjir agar secepat mungkin dan seoptimal mungkin dapat terlaksana karena masyarakat terdampak juga ingin segera beraktivitas seperti semula. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian terkait manajemen dalam menanggulangi bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati adalah untuk mengetahui upaya yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Pati dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Pati.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas. Maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Pati?.

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam manajemen penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Pati?.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat dituliskan tujuannya sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Pati.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Pati.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Akademis

Hasil penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan keterampilan berpikir sistematis dan ilmiah. Terlebih lagi, temuan-temuan tersebut dapat menjadi sumber berharga untuk memandu terciptanya karya tulis ilmiah yang berlandaskan pada penelitian teoritis di lingkungan Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

1.4.2 Tujuan Teoritis

1. Penelitian ini digunakan untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik terkait pemikiran akademis dalam menganalisis Manajemen Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Pati.
2. Penelitian dapat dijadikan bahan dalam peningkatan upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Pati.

1.4.3 Tujuan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian berdasarkan hasil dari proses pembelajaran selama perkuliahan sehingga materi yang dipaparkan di dalam penelitian ini didasari oleh materi yang diajarkan di dalam perkuliahan serta menambah wawasan dan pengalaman untuk melakukan penelitian.

2. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini mampu meningkatkan upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Pati dengan berkontribusi dalam hal saran atau masukan yang positif.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Temuan	Perbedaan
<i>Proposed Framework for the Flood Disaster Management Cycle in Malaysia</i> (Usulan Kerangka Siklus Penanggulangan Bencana Banjir di Malaysia)	Syed Ahmad Hakim Bin Syed Muzamil, dkk. Jurnal : Keberlanjutan 2022, 14, 4088. https://doi.org/10.3390/su14074088	Untuk mengeksplorasi kemungkinan tantangan untuk mengelola bencana banjir di Sarawak dan untuk mengidentifikasi kemungkinan solusi untuk mengelola banjir.	Sistem drainase yang buruk, pembangunan yang cepat, curah hujan yang tinggi, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya koordinasi dalam melaksanakan siklus penanggulangan bencana antar lembaga merupakan tantangan utama.	Penelitian ini membahas tentang usulan kerangka siklus dalam penanggulangan banjir dengan menggunakan sistem drainase dan dibutuhkan partisipasi dari masyarakat serta perlu adanya koordinasi antar lembaga dalam menyukseskan sistem tersebut.
<i>Assessing Institutional Stakeholders'</i>	Parfait K. Kouamé, dkk. Jurnal :	Untuk menilai persepsi pemangku	Praktik kebersihan yang buruk dan kontak dengan air	Penelitian ini membahas kolaborasi antar

Judul Penelitian	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Temuan	Perbedaan
<p><i>Perception and Limitationson Coping Strategiesin Flooding Risk Management in West Africa</i> (Menilai Persepsi Kelembagaan Pemangku Kepentingan dan Keterbatasan Strategi Mengatasi dalam Manajemen Risiko Banjir di Afrika Barat)</p>	<p>Lingkungan. Res. Kesehatan Masyarakat 2022, 19, 6933. https://doi.org/10.3390/ijerph19116933</p>	<p>kepentingan kelembagaan dan keterbatasan strategi penanggulangan dalam pengelolaan risiko banjir di Abidjan (Pantai Gading) dan Lomé (Togo)</p>	<p>yang terkontaminasi adalah penyebab utama risiko. Kolaborasi antara pemangku kepentingan terbatas, mengurangi efisiensi intervensi yang direncanakan. Selain itu, strategi pencegahan risiko kesehatan masih kurang dikembangkan dan diterapkan.</p>	<p>pemangku kepentingan dalam manajemen risiko bencana banjir.</p>
<p><i>Big Data in Criteria Selection and Identification in Managing Flood Disaster Events Based on Macro Domain PESTEL Analysis: Case Study of Malaysia Adaptation Index</i> (Big Data dalam Pemilihan Kriteria dan Identifikasi dalam Pengelolaan Kejadian Bencana Banjir</p>	<p>Mohammad Fikry Abdullah, dkk. Jurnal : Cogn Data Besar. Komputer. 2022, 6, 25. https://doi.org/10.3390/bdcc6010025</p>	<p>(a) Untuk mengeksplorasi, mengidentifikasi potensi untuk dimasukkan dalam rencana pengelolaan banjir dalam perspektif domain makro; (b) Untuk memahami jenis penanggulangan banjir dan tujuan keputusan untuk memfasilitasi keputusan perencanaan pengelolaan banjir;</p>	<p>Meningkatkan identifikasi dan pemilihan kriteria Malaysia <i>Adaptation Index</i> (MAIN) , yang dapat menjadi referensi pelengkap dan pendukung dalam pengelolaan peristiwa bencana.</p>	<p>Penelitian ini membahas bagaimana pemerintah melakukan pemiliha kriteria dalam pengelolaan penaggulangan banjir, seperti Malaysia <i>Adaptation Index</i> (MAIN).</p>

Judul Penelitian	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Temuan	Perbedaan
Berdasarkan Domain Makro PESTEL Analisis: Studi Kasus Indeks Adaptasi (Malaysia)		(c) Untuk memeriksa kemungkinan mekanisme terstruktur untuk pemilihan kriteria berdasarkan teknik analisis keputusan		
<i>Community adaptation strategies toward tidal flood: A Case study in Langsa, Indonesia</i> (Strategi adaptasi masyarakat terhadap banjir rob: Studi kasus di Langsa, Indonesia)	Furqan I. Aksa dan Ramdan Afrian Jurnal : Jurnal Kajian Risiko Bencana ISSN: (Online) 1996-142.	Untuk mengetahui respon dan strategi adaptasi dalam mengelola banjir rob oleh masyarakat pesisir Kota Langsa	Masyarakat setempat mengabaikan bahaya banjir rob dan menganggapnya mengancam jiwa. Selanjutnya, mereka melakukan adaptasi, seperti menaikkan level rumah menggunakan material kayu dan membangun bendungan di sepanjang garis pantai secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah. Adaptasi tersebut dilakukan melalui kerja gotong royong yang disebut gotong royong.	Penelitian ini membahas bagaimana mengatasi banjir rob dengan masyarakat harus melakukan adaptasi terhadap wilayah tempat tinggal masing-masing. Pemerintah disini tidak ikut campur.
<i>A Critical Review of the Disaster Management System in Ghana</i> (Tinjauan Kritis Sistem Manajemen Bencana di Ghana)	Eric Mensah-Bonsu Jurnal : Jurnal Africa Development And Resources Research Institute Vol. 31. 2(8), April, 2022-Juni	Menganalisis penyebab banjir dan dampaknya terhadap populasi umum di Ghana	Bahwa penyebab utama bencana adalah banjir dan evakuasi warga Ghana dari negeri asing. Seberapa efektif NADMO dalam menciptakan kesadaran untuk kesiapsiagaan bencana di antara komunitas rentan di	Penelitian ini membahas peran lembaga penanggulangan bencana dalam mengatasi bencana banjir dan juga dengan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain.

Judul Penelitian	Peneliti dan Jurnal	Tujuan Penelitian	Temuan	Perbedaan
			seluruh negeri juga dievaluasi.	
<i>Rediscovering South Africa: Flood disaster risk management through ecosystem-based adaptation</i> (Menemukan kembali Afrika Selatan: Manajemen risiko bencana banjir melalui adaptasi berbasis ekosistem)	Emmanuel Tolulope Busayoa, dkk. Jurnal : Indikator Lingkungan dan Keberlanjutan 14 (2022) 100175	Untuk menilai tren kejadian banjir di Afrika Selatan dan potensi manajemen risikonya melalui EbA.	Strategi EbA dapat dilembagakan secara regional dan nasional untuk menawarkan adaptasi atau mitigasi bencana banjir yang efisien di daerah rawan banjir.	Penelitian ini membahas tentang penggunaan Strategi EbA dalam mengurangi risiko banjir.

Berdasarkan beberapa penelitian jurnal terdahulu di atas dipergunakan untuk perbandingan atau acuan bagi peneliti nantinya dalam melakukan penelitian di lapangan. Karena dari setiap jurnal terdahulu di atas memiliki perbedaan baik dari segi tujuan dan solusi yang berbeda dalam menangani masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, dengan adanya jurnal peneliti terdahulu bisa memudahkan peneliti dalam melakukan bentuk manajemen penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Pati baik itu dari tata cara ataupun ada hal lain yang belum dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati dalam menangani kasus tersebut.

1.5.2 Kajian Teori

1.5.2.1 Administrasi Publik

Administrasi merupakan suatu upaya secara menyeluruh terhadap segala aktivitas yang berjalan di dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan organisasi tersebut (*goals and objectives*). Publik merupakan beberapa orang yang sama dalam hal berpikir, menyalurkan persaannya, harapan, sikap, dan tindakan sesuai dengan norma yang berlaku (dalam Pasolong, 2014 :6).

Meskipun pengertian administrasi publik telah ada sejak lama, belakangan ini oleh para ahli telah diubah namanya menjadi administrasi negara. Oleh karena itu, Di Indonesia, konsep administrasi publik pada dasarnya bukanlah sesuatu yang baru. Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro sebagaimana dikutip dalam Sodikin (2015:5) mengemukakan lima definisi administrasi publik, di antaranya adalah:

1. Administrasi publik Mencakup cabang pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, beserta keterkaitannya;
2. Administrasi publik Melibatkan upaya kelompok kooperatif dalam konteks pemerintahan;
3. Administrasi publik Menuntut kerja kelompok kolaboratif dalam lingkungan pemerintahan dan Menjadi elemen penting dalam proses politik karena signifikansinya dalam membentuk kebijakan publi. Ini adalah komponen penting dari proses politik dengan berkontribusi aktif dalam perumusan kebijakan Negara;
4. Administrasi publik memelihara hubungan dekat dengan berbagai organisasi swasta dan individu yang menyediakan layanan masyarakat (Administrasi publik sangat erat kaitannya dengan banyak organisasi swasta dan individu yang menawarkan layanan masyarakat);
5. Administrasi publik menunjukkan perbedaan besar dari administrasi swasta.

Setelah mencermati beragam definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik melibatkan upaya kolaboratif sekelompok individu dalam organisasi publik untuk mengatasi masalah publik melalui perumusan kebijakan publik. Selanjutnya, manajemen publik yang baik mencakup proses manajemen yang diarahkan untuk mencapai tujuan negara.

Keterkaitan Administrasi Publik dengan penelitian nantinya perlu diketahui bahwa administrasi mencakup banyak hal memiliki cakupan yang luas. Dengan adanya administrasi bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Pati. Selain kesejahteraan, ketentraman, kepuasan juga akan dirasakan oleh masyarakat setempat.

1.5.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Berbicara mengenai administrasi publik maka tidak terlepas dari pergeseran paradigma administrasi publik yang terjadi selama ini. Pergeseran tersebut dikarenakan paradigma sebelumnya mengalami berbagai masalah dan dipandang sudah tidak relevan dengan situasi saat ini bahkan membuat orang tidak lagi percaya pada paradigma yang ada yang kemudian berusaha membangun paradigma baru. Terkait dengan pembahasan paradigma maka Thomas S. Khun (Syafiie, 2010:26) Pengertian paradigma menurut Thomas S. Kuhn adalah suatu cara pandang, seperangkat nilai, kumpulan prosedur, rangkaian gagasan mendasar, atau suatu pendekatan pemecahan masalah yang mendapat penerimaan dalam komunitas ilmiah pada tingkat tertentu. momen dalam waktu. Secara singkat paradigma adalah cara berpikir yang dianut oleh seorang individu atau sekelompok individu. Nicholas Henry dalam Keban (2014:31-33) mengungkapkan bahwa terdapat lima paradigma Administrasi Negara yang diuraikan seperti berikut ini:

1. Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Goodnow berpendapat bahwa politik harus berkonsentrasi pada

pembuatan kebijakan atau artikulasi keinginan rakyat, sedangkan administrasi harus memusatkan perhatian pada pelaksanaan atau implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. Demarkasi antara politik dan administrasi ditegaskan oleh pembagian antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam paradigma ini, administrasi harus dianggap netral nilai, bertujuan untuk efisiensi dan nilai ekonomi dalam tata kelola birokrasi. Perspektif ini menekankan peran “*birokrasi pemerintah*” namun kurang menekankan pada fokus.

2. Paradigma 2: Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Prinsip-prinsip administrasi Gulick dan Urwick, yang meliputi penempatan staf, pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran, merupakan fokus utama dari paradigma ini. Administrasi publik dibingkai berdasarkan prinsip-prinsip universal yang dapat diterapkan dalam konteks apa pun. Penekanan pada prinsip-prinsip administratif ini menempatkan administrasi publik kurang spesifik pada lokasinya, karena dapat diterapkan secara efektif baik di organisasi pemerintah maupun swasta.

3. Paradigma 3 : Administrasi sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Morstein-Marx, editor buku "Elements of Public Administration" tahun 1946, menimbulkan keraguan tentang kelayakan atau realisme mempertahankan pemisahan tegas antara politik dan administrasi. Senada dengan itu, Herbert Simon mengkritik penerapan prinsip-prinsip administrasi yang tidak merata. Administrasi negara, sebagaimana diamati dalam dua belas konteks ini, dibentuk oleh nilai-nilai tertentu dan bukannya menganut sikap bebas nilai atau universal. Disini terjadi pertentangan antara anggapan mengenai *value free administration* disatu pihak dengan anggapan akan *value laden politics* lain pihak.

4. Paradigma 4: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Terdapat dua arah perkembangan pada paradigma ini yaitu ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial dan yang berorientasi pada kebijakan publik. Fokus pada paradigma ini adalah perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penerapan teknologi modern yang diasumsikan dapat diterapkan baik pada dunia bisnis maupun dunia administrasi publik sehingga lokus menjadi tidak jelas.

5. Paradigma 5: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970-?)

Paradigma ini telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus Administrasi Publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan publik sedangkan lokus nya adalah masalah-masalah dan kepentingan publik.

6. Paradigma 6 : *Governance* (1990-sekarang)

Konsep paradigma ini merupakan penerjemahan baru dan aplikasi dari akhir tahun 1980 sampai 1990. Menurut Tamayan (dalam Ikeanyibe dkk, 2017), konsep ini dapat dikatakan sebagai praktik dari kekuasaan dan wewenang yang dilakukan oleh para pimpinan politik untuk kesejahteraan warga negara, proses kompleks dimana beberapa sektor masyarakat memegang kekuasaan, dan memberlakukan serta mengumumkan kebijakan publik yang secara langsung mempengaruhi interaksi manusia dan kelembagaan, ekonomi, serta perkembangan sosial. Selain itu, Stoker (dalam Ikeanyibe dkk, 2017) melanjutkan bahwa Paradigma ini merangkum lima klaim penting dan paradoks, yang pada akhirnya membentuk prinsip-prinsip intinya:

1. Suatu jaringan yang melibatkan organisasi dan individu baik di dalam maupun di luar pemerintahan.
2. Tanggung jawab dan batasan ditujukan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi.
3. Saling ketergantungan kekuasaan antar institusi yang terlibat dalam aksi kolektif.
4. Jaringan aktor otonom yang menunjukkan pengorganisasian mandiri.
5. Kemampuan untuk menyelesaikan tugas secara mandiri, terlepas dari wewenang pemerintah atau kemampuannya untuk menegakkan perintah.

Paradigma Penelitian Ini :

Kajian ini sejalan dengan paradigma Governance yang disebut sebagai paradigma keenam yang mengutamakan jaringan pemerintah, kemitraan, dan kolaborasi. Berbeda dengan proses internal, organisasi, sumber daya keuangan, waktu, pengetahuan, dan kapasitas manusia, model pemerintahan baru ini lebih mementingkan jaringan, kemitraan, kolaborasi, dan berbagai faktor lain yang menekankan keterlibatan eksternal dalam pemerintahan. Berdasarkan kerangka tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati mengambil peran sebagai badan penanggulangan bencana daerah di Pati. Oleh karena itu, dalam menyikapi permasalahan perencanaan di Kabupaten Pati, seperti bencana banjir, perlu dipertimbangkan secara matang model paradigma tata kelola ini.

1.5.2.3 Manajemen Publik

Manajemen sangat dibutuhkan agar tujuan pribadi atau organisasi bisa tercapai. Manajemen juga sangat diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi. Adapun orang yang mengatur, merumuskan, dan melaksanakan berbagai tindakan manajemen disebut manajer. Manajemen sendiri banyak ditemukan diberbagai bidang salah satunya di publik. Sesuai yang termuat dalam jurnal

Komodifikasi Penjor sebagai Sarana Persembahyangan Umat Hindu, Hery Ketut menurut Saortua Marbun dan Sony Pratama (2016:113) menggali berbagai sudut pandang ahli mengenai pengertian manajemen, antara lain:

1. Menurut James A.F. Stoner, manajemen dicirikan sebagai proses pengorganisasian, perencanaan, dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditentukan.
2. R. Terry mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses tersendiri yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan, dan pengendalian tindakan yang diterapkan pada beragam sumber daya alam dan manusia untuk mencapai target yang telah ditentukan.
3. Dr. Oey Liang Lee mendefinisikan manajemen sebagai ilmu merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, memimpin, dan mengawasi berbagai tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Menurut F.W. Taylor, manajemen merupakan seni untuk memahami apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara termudah dan termurah untuk melakukannya sebaik mungkin.
5. Menurut Henry Fayol, manajemen diartikan sebagai proses mengantisipasi, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, memerintahkan, dan mengatur tindakan orang lain untuk mencapai tujuan bersama.

Meskipun terdapat pengaruh besar "manajemen ilmiah" terhadap manajemen publik, Overman, sebagaimana dikutip dalam Keban (2004: 85), berpendapat bahwa manajemen publik berbeda dengan "manajemen ilmiah". Sebaliknya, administrasi publik dan manajemen publik tidak serta merta mencerminkan konflik yang timbul dari orientasi politik kebijakan. Manajemen publik adalah bidang interdisipliner yang menggabungkan unsur-unsur sumber daya manusia, keuangan, fisika, informasi, dan politik, mengintegrasikannya dengan fungsi-fungsi manajemen seperti

pengorganisasian, perencanaan, dan pengendalian, sehingga mewakili studi komprehensif tentang aspek organisasi secara umum.

Menurut Wilson (dalam Pasolong, 2013: 96) Manajemen publik dipengaruhi oleh empat prinsip dasar yang membentuk kajiannya: (1) pemerintah berfungsi sebagai lingkungan organisasi utama; (2) memberi penekanan pada fungsi eksekutif; (3) mengenai penerapan prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai hal yang penting untuk mengembangkan kompetensi administratif; dan (4) menggunakan metode komparatif untuk mencermati sejarah perkembangan bidang tersebut.

George R. Terry menyebutkan empat fungsi manajemen (Harsuki 2012:79):

1. Pengorganisasian Kemampuan untuk melihat ke depan berdasarkan tujuan tertentu dan merencanakan, memprediksi, dan memvisualisasikan.
2. Perencanaan Proses pengorganisasian melibatkan pemberian berbagai tugas kepada anggota kelompok dan memantau kontribusi mereka.
3. *Actuating* Dalam manajemen, *actuating* melibatkan upaya manajer untuk melaksanakan tindakan, termasuk membantu anggota kelompok dalam menyelesaikan tugasnya, memberikan bimbingan, mengeluarkan arahan, membantu anggota dalam meningkatkan hasil kerja melalui kreativitasnya, dan membina kolaborasi yang antusias.
4. Mengawasi dan Mengarahkan Dalam peran manajerial pengawasan, manajer bertanggung jawab untuk memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pekerjaan untuk memastikan tugas yang direncanakan dilaksanakan dengan benar.

Pemaparan manajemen publik tersebut bisa disimpulkan sebagai upaya dalam mencapai tujuan suatu organisasi dengan mengelola sumber daya yang terkandung di dalamnya. kandungan di

dalam manajemen publik adalah pelayanan masyarakat sehingga manajemen publik dituntut mampu melayani masyarakat secara optimal.

1.5.2.4 Manajemen Bencana

Fungsi manajemen konvensional yaitu perencanaan, pengorganisasian, penugasan, pengaturan, dan pengawasan merupakan bagian integral dari proses dinamis manajemen bencana. Upaya kolaboratif dari berbagai organisasi sangat penting untuk melaksanakan kegiatan pemulihan bencana, tanggap darurat, kesiapsiagaan, pencegahan, dan mitigasi.

Keberhasilan manajemen bencana adalah adanya dukungan dari masyarakat dan instansi yang menjadi leading sector yaitu, BPBD (Setyawan et al, 2019:29).

Urgensi manajemen bencana, yaitu melaksanakan kegiatan yang konkret guna pengendalian dan penanggulangan bencana untuk meminimalisir dampak negatif seperti dengan menyelamatkan korban, nyawa, dan kerugian harta benda secara cepat dan tepat. Tentunya untuk mencapai hal tersebut diperlukan kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap bencana alam. Dalam penelitian ini peneliti hanya akan mengkaji bagaimana badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dalam menangani bencana banjir yang setiap tahunnya mengalami perluasan wilayah yang dilanda bencana banjir dari tahun 2020 – 2022. Proses manajemen penanggulangan bencana nantinya akan ditinjau dari tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Pati.

1.5.2.5 Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana. Kegiatan ini meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Menurut UU No. 24 tahun 2007, prinsip penanggulangan bencana adalah:

- a) Cepat dan akurat.
- b) Penting.

- c) Integrasi dan koordinasi.
- d) Efektif dan efisien.
- e) Akuntabilitas dan transparansi.
- f) Kolaborasi.
- g) Pemberdayaan.
- h) Non-diskriminatif.
- i) Nonproletisi.

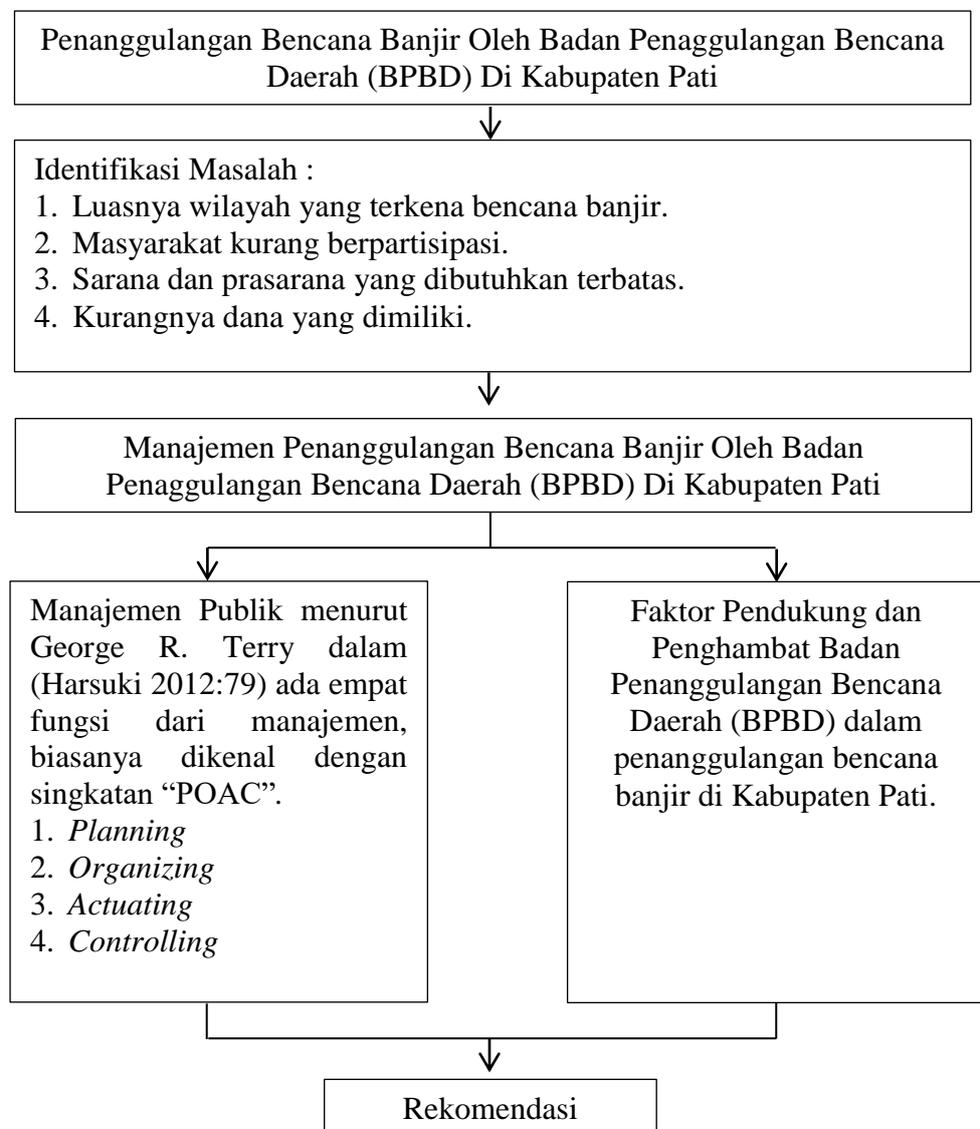
Tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana dirinci dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Penanggulangan Bencana. Tanggung jawab utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meliputi.

1. Merumuskan kebijakan dan memberikan pedoman inisiatif penanggulangan bencana yang mencakup tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara merata dan berkeadilan.
2. Memanfaatkan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka untuk menetapkan standar dan persyaratan pelaksanaan penanggulangan bencana.
3. Merakit, mengidentifikasi, dan memperbarui peta risiko bencana.
4. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
5. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
6. Mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan maupun kerugian materiil, imateriil dan korban jiwa.
7. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana.
8. Membangun partisipasi dan kemitraan pemangku kepentingan
9. Memenuhi tanggung jawab tambahan sesuai dengan persyaratan hukum.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan menerapkan rencana manajemen bencana, merespons situasi pengungsi secara efisien dan efektif.
2. Merencanakan, mengintegrasikan, dan mengoordinasikan secara komprehensif pelaksanaan inisiatif manajemen bencana.

1.5.3 Kerangka Berpikir



1.6 Operasionalisasi Konsep

Elemen dasar manajemen klasik, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian, dan pengawasan, menjadi landasan bagi evolusi proses dinamis yang dikenal sebagai manajemen bencana. Kabupaten Pati merupakan daerah di Indonesia yang memiliki daerah rawan banjir yang cukup banyak. Urgensi manajemen bencana, yaitu melaksanakan kegiatan yang konkret guna pengendalian dan penanggulangan bencana untuk meminimalisir dampak negatif seperti dengan menyelamatkan korban, nyawa, dan kerugian harta benda secara cepat dan tepat. Dalam penelitian ini peneliti hanya akan mengkaji bagaimana badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dalam menangani bencana banjir yang setiap tahunnya mengalami perluasan wilayah yang dilanda bencana banjir dari tahun 2020 – 2022. Proses manajemen penanggulangan bencana nantinya akan ditinjau dari tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Pati. Manajemen penanggulanga tersebut dapat diukur dengan indikator menurut George R. Terry dalam (Harsuki 2012:79) ada empat fungsi dari manajemen, biasanya dikenal dengan singkatan “POAC” yaitu *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*.

1. Perencanaan (*Planning*)

Di dalam penelitian ini yaitu perencanaan untuk mengatasi masalah banjir di Kabupaten Pati. Adapun fenomena dari perencanaan (*planning*) yaitu:

- 1) Mengatasi tingginya genangan air di beberapa daerah di Kabupaten Pati.
- 2) Mengatasi lamanya air surut di daerah yang terkena bencana banjir.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Berusaha untuk menugaskan anggota kelompok untuk tugas yang berbeda dan mencatat kontribusi setiap orang adalah bagian dari pengorganisasian. Pengorganisasian melibatkan pemberian tanggung jawab untuk peran masing-masing anggota atau kelompok:

1) Tugas pokok dan tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati mencontohkan fenomena pengorganisasian.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Mengambil tindakan mencakup membantu anggota kelompok dalam menyelesaikan tugas, memberikan kepemimpinan, menawarkan instruksi, membantu anggota dalam meningkatkan hasil kerja melalui kreativitas mereka, dan memupuk kolaborasi yang antusias. Tindakan-tindakan ini mewakili peran manajer dalam proses dinamis manajemen. Adapun fenomena dari penggerakan (*actuating*) yaitu:

- 1) Sosialisasi kepada masyarakat.
- 2) Pemantauan cuaca dan sistem peringatan dini.
- 3) Sistem pengendalian banjir.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Upaya manajer untuk memantau, mengawasi, dan menyelidiki pekerjaan untuk memastikan pelaksanaan tugas yang direncanakan secara akurat merupakan indikasi pengendalian. Fenomena observasional yang berkaitan dengan pengendalian antara lain:

- 1) Kepatuhan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati.
- 2) Pemenuhan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 di Kabupaten Pati yang menguraikan tentang struktur dan pedoman operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati.

1.7 Argumen Penelitian

Indonesia merupakan negeri tropis dengan penyinaran serta curah hujan yang menyeluruh di setiap penjuru Indonesia. Pada masa hujan, intensitas curah hujan di Indonesia amat besar membuat sebagian wilayah khususnya pada dataran rendah rentan terjalin bencana banjir. Bencana banjir disebagian wilayah Indonesia, hingga saat ini masih menjadi isu penting

yang harus ditanggulangi. Kabupaten Pati merupakan daerah di Indonesia yang memiliki daerah rawan banjir yang cukup banyak.

BPBD Kabupaten Pati sendiri merupakan sebuah badan yang bekerja mengatasi bencana alam termasuk di dalamnya bencana alam banjir di daerah Kabupaten Pati yaitu termuat dalam Peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 mengenai Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati. Berdasarkan peraturan tersebut, tugas BPBD Kabupaten Pati adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPBD mempunyai fungsi (BPBD Kab. Pati, 2019).

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun dari Pemerintah Kabupaten Pati belum banyak membuahkan hasil. Masih ada beberapa wilayah yang masih terkena bencana banjir setiap tahunnya. Ada beberapa permasalahan dalam penanganan bencana banjir ini seperti luasnya cakupan wilayah, kurangnya partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Berdasarkan keadaan tersebut, perlunya dilakukan manajemen penanggulangan yang nantinya mencakup rencana, pelaksanaan, dan evaluasi sejauh mana upaya yang telah dilakukan dalam menangani bencana banjir dengan maksud adanya sistem manajemen upaya yang dilakukan dapat memberikan arah yang jelas dalam penanggulangan bencana banjir, meninjau kekuatan BPBD yang akan digunakan agar dapat membuat langkah-langkah yang efektif serta efisien, serta mengetahui faktor-faktor penghambat yang dapat timbul dalam penanggulangan bencana banjir supaya dapat mengurangi resiko kegagalan dalam proses yang ada. Dengan adanya hal itu, melatarbelakangi peneliti untuk membuat kajian tentang manajemen penanggulangan bencana banjir agar secepat mungkin dan seoptimal mungkin dapat terlaksana karena masyarakat terdampak juga ingin segera beraktivitas seperti semula.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengkarakterisasi dan memadatkan berbagai keadaan, peristiwa, atau fenomena dalam realitas sosial masyarakat yang diteliti. Sebagaimana ditegaskan Basrowi dan Suwandi (2008:27), penelitian kualitatif menekankan pada analisis induktif terhadap data yang dikumpulkan dalam suatu bidang yang spesifik dan unik untuk mengembangkan hipotesis atau teori yang dapat dibagikan secara luas. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Tujuan penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk menjawab dan memperoleh solusi atas permasalahan penelitian yang berkaitan dengan fenomena sosial. Ciri-ciri penelitian kualitatif dapat dipahami dengan mengkaji definisi metode kualitatif dan deskriptif. Menurut Arikanto (2006:15), ciri-ciri atau ciri-ciri penelitian kualitatif antara lain:

1. Sifat Induktif,
2. Pertimbangan Situasi dan Reaksi Secara Holistik,
3. Memahami Perspektif Responden,
4. Penekanan pada Kemampuan Peneliti untuk Validitas,
5. Pentingnya Lingkungan Alam, dan
6. Pendekatan Berorientasi Proses.

Untuk menghindari pengukuran dan perbandingan variabel satu sama lain, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen, catatan, dan catatan penelitian dari lapangan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, satu-satunya variabel yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah Penanggulangan Bencana Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati.

1.8.2 Situs Penelitian

Terkait dengan fokus penelitian, keterbatasan yang menjadi pertimbangan peneliti adalah mengkaji tentang tanggung jawab dan tugas pokok yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati terkait bencana banjir. Hal ini mencakup upaya yang berkaitan dengan rehabilitasi bencana banjir, manajemen tanggap darurat, dan rekonstruksi. Oleh karena itu, penekanan utama kajian penelitian ini adalah pada Strategi Pengelolaan Pasca Banjir di Kabupaten Pati.

Dalam ranah pencegahan dan penanganan bencana banjir di Kabupaten Pati, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati dipandang melaksanakan pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari tugas dan fungsinya.

1.8.3 Subjek Penelitian

Individu yang berpartisipasi dalam penelitian ini berperan sebagai subjek penelitian, dan proses pemilihan informan ini sangat penting untuk penelitian. Metode yang digunakan dalam pemilihan partisipan adalah purposive sampling, disebut juga dengan purposive sampling. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2011:85), purposive sampling melibatkan pemilihan sampel yang disengaja berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang dianggap paling tepat oleh penulis untuk menangkap dan memahami masalah yang diselidiki. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang komprehensif agar dapat menyimpulkan penelitian secara efektif. Penggunaan informan inti diyakini dapat meminimalkan kesalahan penelitian dan mengidentifikasi subjek yang dianggap paling relevan untuk penyelidikan penelitian.

Untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi dilapangan, maka Spradly (dalam Faisal, 1990:44) menerangkan persyaratan yang dipenuhi oleh seorang informan yaitu :

1. Individu yang memperoleh kemahiran dan pemahaman melalui proses enkulturasi, memungkinkan mereka tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga menghayati dan mengalaminya.
2. Orang-orang ini tergolong aktif terlibat dalam kegiatan penelitian yang sedang berlangsung.
3. Orang yang mempunyai cukup waktu atau kesempatan untuk mencari dan meminta informasi.

Maka informan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Kepala Sekretariat Kepegawaian BPBD Kabupaten Pati.
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pati.

1.8.4 Jenis Data

Sugiyono (2015) membedakan dua kategori tipe data: kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggabungkan jenis data kualitatif dan kuantitatif.

1. Data Kualitatif Sugiyono (2015) mengartikan data kualitatif sebagai informasi yang disajikan dalam bentuk kata-kata, diagram, atau gambar. Dalam penelitian ini data kualitatif meliputi nama dan alamat subjek penelitian.
2. Data Kuantitatif Sugiyono (2015) mengkarakterisasi data kuantitatif sebagai informasi dalam bentuk numerik atau data kualitatif yang telah dirangkum.

Dari dua jenis data di atas dalam penelitian ini nantinya menggunakan data kualitatif.

1.8.5 Sumber Data

Karena data dalam penelitian disajikan dalam bentuk numerik yang menunjukkan besaran dan nilai variabel yang diwakilinya, maka dikategorikan sebagai data kuantitatif. Dua sumber data utama yang digunakan dalam penelitian seperti yang diungkapkan Sugiyono (2015): sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini.

1. Data Primer

Data Primer: Sumber ini secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data dan biasanya dikumpulkan melalui wawancara dengan sumber yang dapat dipercaya.

2. Data Sekunder

Data Sekunder: Sumber ini secara tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data, seringkali melalui dokumen atau individu lain. Contohnya melalui perantara pihak ketiga atau berdasarkan penganalisisan dokumen yang telah tersedia. Data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti ialah berdasarkan literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian tengah dilangsungkan.

1.8.6 Teknik Pengumpul Data

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data penelitian yang melibatkan pemeriksaan secara dekat keadaan atau keadaan subjek. Data yang diperoleh dari observasi tidak hanya mencakup sikap subjek penelitian tetapi juga perilakunya. Menurut Kartono (1980:142), observasi adalah penggunaan pengamatan dan pencatatan yang disengaja dan sistematis untuk mempelajari fenomena sosial dan gejala psikologis. Tujuan observasi adalah untuk memahami ciri-ciri dan pentingnya interaksi antara berbagai aspek perilaku manusia dalam fenomena sosial yang rumit dan pola budaya tertentu. Dalam kesempatan ini, peneliti mengamati sendiri bagaimana tugas pokok dan tanggung jawab BPBD Kabupaten Pati dijalankan di lapangan. Kajian tersebut meliputi observasi pelaksanaan penanggulangan bencana banjir oleh BPBD sebelum, saat, dan pasca bencana banjir. Selain itu, peneliti mengkaji sarana dan prasarana yang digunakan BPBD dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

2. Wawancara

Wawancara, sebagai bentuk percakapan dengan orang yang diwawancarai untuk mengumpulkan informasi, dilakukan dalam penelitian ini. Individu yang memiliki pengetahuan dan memahami permasalahan utama yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti yang dibahas dalam subbab sebelumnya, diwawancarai. Wawancara ialah serangkaian aktivitas untuk menelusuri data berdasarkan kegiatan wawancara. Karena kondisi yang sudah memungkinkan untuk bisa datang langsung ke Kantor BPBD Kabupaten Pati untuk melakukan wawancara secara langsung untuk mengetahui juga sejauh mana strategi yang dibuat untuk mengatasi bencana alam banjir di Kabupaten Pati. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap enam orang informan yang terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pati, Kepala Sekretariat BPBD Kabupaten Pati, Kasubbag Keuangan BPBD Kabupaten Pati, Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Pati, Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kabupaten Pati, dan Kepala Seksi Rekonstruksi BPBD Kabupaten Pati.

3. Dokumentasi

Pengertian dokumen menurut Gottschalk Louis (1986:38) adalah dalam penelitian sejarah, sumber tertulis seperti dokumen dibedakan dari artefak, peninggalan lukisan, peninggalan arkeologi, dan kesaksian lisan. Dokumen mencakup korespondensi negara dan resmi, termasuk perjanjian, undang-undang, dan hibah. Untuk penelitian ini dokumentasi meliputi notulen kegiatan, laporan kerja, dan bahan relevan lainnya yang memberikan informasi tentang permasalahan yang diteliti.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis melibatkan pemberian makna atau interpretasi terhadap data yang dikumpulkan melalui observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Analisis data adalah proses sistematis untuk memeriksa dan mengekstraksi informasi secara menyeluruh dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain, sehingga hasilnya mudah dipahami dan dibagikan kepada orang lain. Sugiyono, mengutip Miles dan Huberman, mencatat bahwa aktivitas interaktif tetap ada hingga tugas selesai, sehingga menghasilkan data jenuh selama proses analisis data kualitatif. Ada tiga langkah yang terlibat dalam kegiatan analisis data.

1. Reduksi Data (*data reduction*) Prosedur memadatkan informasi dan menentukan elemen-elemen kunci yang selaras dengan pertanyaan penelitian disebut reduksi data. Proses yang rumit ini menuntut wawasan, keluasan, dan pemahaman yang mendalam. Intinya, reduksi data melibatkan merangkum, membuat prioritas, memfokuskan pada elemen-elemen penting, mengidentifikasi pola, dan menghilangkan informasi yang tidak relevan..
2. Penyajian Data (*data display*) Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. *Data display* adalah proses pengorganisasian untuk memudahkan data untuk dianalisis dan disimpulkan. Data disajikan secara mudah dipahami dengan menyusunnya ke dalam pola relasional. Dalam penelitian kualitatif, kalimat yang menggambarkan suatu peristiwa di lapangan dapat digunakan untuk menyajikan data, dalam bentuk deskripsi ringkas atau format serupa.
3. Verifikasi (*concluding drawing*) Dalam analisis data kualitatif, penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah ketiga. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang diharapkan sering kali merupakan temuan baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Temuan-temuan ini mungkin bermanifestasi sebagai penjelasan deskriptif atau gambaran yang jelas tentang suatu objek atau fenomena yang sebelumnya tidak jelas atau kabur namun menjadi jelas melalui pemeriksaan menyeluruh.

Pada hakikatnya analisis data kualitatif adalah suatu proses menemukan dan mengumpulkan informasi yang dikumpulkan secara sistematis melalui tahapan reduksi data (merangkum informasi), display data (menyajikan informasi dalam suatu tampilan), dan verifikasi data (mengkonfirmasi/membuktikan informasi). Hal ini memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipahami dan berharga bagi orang lain.

1.8.8 Kualitas Data

Dalam melangsungkan penelitian dengan tipe kualitatif harus sesuai dengan standar akan kredibilitas, yang dimana penyesuaian ini dilakukan guna penelitian yang dihasilkan memiliki tingkat kebenaran data dan kepercayaan yang tinggi yang dimana sesuai juga dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Triangulasi ialah langkah yang dapat ditempuh apabila hendak memeriksa nilai keabsahan sebuah data berdasarkan sumbernya, hal ini berarti perlunya sebuah upaya dalam melangsungkan perbandingan dan mengeceknya berulang kali sehingga memperoleh sebuah informasi yang dapat dipercaya keakuratannya.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Untuk mengevaluasi keandalan data, teknik triangulasi melibatkan perbandingan data dari sumber yang sama dengan menggunakan berbagai metode. Misalnya, data yang dikumpulkan melalui wawancara selanjutnya dapat diverifikasi melalui observasi dan dokumentasi.

3. Triangulasi waktu

Kredibilitas juga dipengaruhi oleh waktu pengumpulan data. Wawancara yang dilakukan di pagi hari, ketika narasumber masih

waspada dan belum menemui banyak tantangan, kemungkinan besar akan menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dan valid. Oleh karena itu, data dapat diverifikasi silang untuk kredibilitasnya melalui wawancara atau observasi yang dilakukan dalam berbagai kondisi.